

BAPONGKA, SISTEM BUDAYA SUKU BAJO DALAM MENJAGA KELESTARIAN SUMBER DAYA PESISIR

Yohanes Kristiawan Artanto

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Kelas II Semarang

Abstract

Bajo communities have local knowledge which contains the value of the preservation of marine and coastal ecosystems in the form of traditions, rules or restrictions hereditarily practiced, maintained and adhered Bajo community in protecting and utilizing coastal areas sustainably. One is the activity called Bapongka (babangi), that is, the Bajo fishing activities conducted in groups for several weeks or even months using large sized boats called leppa or sopek. Bapongka has common values that can be interpreted as an attempt to tighten silaturrahi (brotherhood relationship) among family members, as the activities are generally carried out by involving the family (wife and children) and also fellow fishermen, implemented by way of a group to use 3 to 4 boats set off hand in hand. The Bajo tribe's tradition is an activity that serves to safeguard the environment, preserve the resources, and prevent damage to marine and coastal ecosystems.

Key words: *Bapongka, Bajo communities, preservation of natural resources, coastal tradition.*

1. Pendahuluan

Suku Bajo memiliki sistem etika dan kebudayaan sendiri. Sistem tersebut menjadi pedoman hidup mereka dan mengarahkan kehidupan keseharian mereka dari generasi ke generasi. Budaya mereka mencakup berbagai aturan yang dihasilkan dari pengalaman dan spiritualitas mereka dengan kehidupan mereka yang bergantung sepenuhnya pada alam. Sebagai masyarakat pesisir, suku Bajo memiliki karakter yang keras, tegas, dan terbuka. Karena seluruh kehidupannya yang berhadapan dengan laut, karakteristik kehidupan sosial, budaya dan ekonominya sangat dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap kekuatan alam yang melingkari kehidupan sehari-hari. Komunitas Bajo yang mendiami suatu daerah pesisir memiliki kedekatan emosional terhadap sumber daya alam (SDA) yang melahirkan perilaku nyata mempertimbangkan ekologis dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kedekatan masyarakat Bajo dengan laut dan pesisir memungkinkan mereka memiliki berbagai pengetahuan lokal tentang gejala-gejala alam. Terdapat gejala

alam dan tanda-tanda atmosfer yang masih digunakan masyarakat Bajo saat melaut. Pengetahuan itu diketahui dan telah diterapkan sejak mereka masih dalam kanak-kanak. Mereka belajar secara otodidak dari generasi pendahulu mereka. Meski perkembangan ilmu pengetahuan makin maju namun pengetahuan lokal tentang gejala alam yang dimiliki masyarakat Bajo masih menjadi acuan bagi mereka dalam menjalani kehidupan di laut.

Sistem etika, adat, dan budaya ini terbukti mampu membuat masyarakat Bajo mampu bertahan dan hidup selaras dengan kawasan pesisir dan lautan yang menjadi penghidupannya hingga sekarang. Kearifan dan pengetahuan lokal tersebut merupakan hasil dari proses yang sangat panjang dari generasi ke generasi. Salah satu kearifan lokal yang dimiliki suku Bajo dalam memperlakukan lingkungannya adalah kegiatan yang dinamakan *Bapongka* atau biasa juga disebut *Babangi*. Kearifan suku Bajo ditunjukkan dengan sangat menjaga lingkungan laut. Hal ini dilakukan karena mereka sadar sangat membutuhkan laut sebagai sumber energi atau kehidupan.

Maka kemudian memperlakukan alam laut itu dengan baik adalah sebuah kewajiban bagi mereka. Apabila laut dijaga dengan baik, maka ikan-ikan juga akan mendapatkan kehidupan yang baik, yang mana nantinya ikan itu akan diambil oleh manusia sebagai sumber energi. Pada akhirnya tradisi ini dianggap sebagai sebuah siklus kehidupan, manusia dan makhluk hidup laut butuh laut, manusia menjaga laut sehingga laut juga akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Kita tidak akan menemukan kotoran akan dilempar dilayangkan serampangan ke laut di lingkungan pemukiman masyarakat Bajo. Mereka sangat menjaga agar laut terus bersih, jauh dari kerusakan.

Sayangnya kearifan tersebut kini sudah mulai terkikis seiring perubahan zaman dan pengaruh budaya masyarakat yang datang dari luar komunitas suku Bajo dengan berbagai jenis alat tangkap dan teknologi yang lebih modern telah memicu persaingan antar masyarakat, rusaknya ekosistem perairan laut dan terancamnya kelestarian sumber daya alam pesisir dan laut. Masuknya modernisasi pada suku Bajo jelas bersentuhan dengan nilai budaya, gaya hidup, dan pada satu sisi berdampak pada efektifitas dan peningkatan hasil tangkapan nelayan. Alih teknologi dapat dipastikan meningkatkan produksi dan pendapatan nelayan. Penggunaan armada laut sudah banyak yang berubah, tidak lagi untuk hanya keperluan sehari-hari dalam memperoleh hasil tangkapan ikan, sudah banyak pencampuran budaya (asimilasi) misalnya antara Bajo-Bugis-Mandar dalam gaya pemanfaatan sumber daya hayati pesisir dan laut. Sebagai salah satu dampak, kini sulit mendapatkan ikan terutama pada musim kemarau, harus keluar pulau dengan jarak yang jauh untuk mendapatkan ikan.

Tulisan ini mencoba membahas mengenai *Bapongka* yang merupakan kearifan lokal suku Bajo terkait pemanfaatan sumber daya alam pesisir

secara berkelanjutan sebagai sistem budaya, termasuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dampaknya terhadap upaya pelestarian ekosistem laut dan pesisir, dan bagaimana *Bapongka* yang dilakukan oleh generasi Bajo sekarang.

2. Suku Bajo dan Ketergantungannya terkait Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir

Komunitas suku Bajo mendiami sebagian perairan di Indonesia, terutama di wilayah timur Indonesia dan selain di Indonesia, juga mendiami perairan Johor dan Filipina, komunitas mereka terbanyak di wilayah Sulawesi. Suku Bajo hidup berpindah-pindah secara berkelompok menuju tempat yang berbeda menurut pilihan lokasi penangkapan ikan. Laut dijadikan sebagai sumber kehidupan (*panamamie ma di lao*). Mereka mempunyai prinsip bahwa *pinde kulitang kadare, bone pinde sama kadare* yang berarti memindahkan orang Bajo ke darat, sama halnya memindahkan penyu ke darat (Suyuti, 1996) atau dengan kata lain merenggut kehidupannya. Bahkan kepala mereka akan pusing jika tidak mendengar suara ombak. Meskipun Suku Bajo terpisah secara geografis, namun terdapat kemiripan aturan adat, budaya, dan 531tern nilai yang berlaku, sehingga suku Bajo dapat digolongkan sebagai satu etnis terpisah yang memiliki asal keturunan yang sama (Anwar, 2006 dalam Baskara dan Astuti, 2011). suku Bajo adalah sebuah yang tidak terpisahkan dengan laut. Laut bagi orang Bajo merupakan cermin kehidupan masa lalu, kekinian, dan harapan masa depan, selain itu laut juga dianggap sebagai kawan, jalan, dan persemayaman para leluhur. Pendeknya, laut adalah segalanya. Bajo merupakan suku yang sering disebut dengan suku laut karena bergantung pada laut untuk pemenuhan kehidupannya sehari-hari (Baskara dan Astuti, 2011). Begitu dekat dan akrabnya dengan laut, seorang Bajo telah dikenalkan kepada laut sejak dari bayinya, bahkan sejak masih dalam

kandungan. Tuhan telah memberikan dunia ini dengan segala isinya, manusialah yang memikirkan bagaimana cara memperoleh dan mempergunakan pemberian-Nya itu. Begitu cara pandang hidup mereka.

Suku Bajo dikenal sebagai pelaut ulung yang hidup dan matinya berada di atas lautan, bahkan awalnya dulu seluruh kehidupan mereka dihabiskan di atas perahu di perahu yang selalu mengarungi lautan (Suyuti, 2011). Perahu yang digunakan disebut *Leppa* atau *Soppe* (Baskara dan Astuti, 2011). Karena kemajuan zaman dan kebutuhan ekonomi, kini sebagian besar suku Bajo telah menetap di berbagai wilayah. Meskipun demikian, mereka masih menetap di kawasan pesisir di bagian atas laut, bukan di daratan. Rumahnya harus tetap berada di sisi bagian laut, bukan di sisi bagian darat. Perkampungan suku Bajo dibangun menjorok ke lautan bebas, tempat mencari penghidupan. Pola pemukiman masyarakat Bajo sangat unik, saat ini perumahan penduduk berupa panggung yang dibangun di atas permukaan air laut pada ke dalaman antara satu sampai delapan meter, dengan jembatan kayu sebagai penghubung antar rumah. Tiang rumah dan jembatan dibangun menggunakan kayu dari tanaman tahan air, *gopasa*, yang diambil di luar kawasan mangrove. Awalnya, masyarakat menggunakan tanaman sudah tua dan mati disebut *posi-posi*, yang diambil dari hutan mangrove. Pola pemukiman menetap komunitas Bajo di tepi pantai dan pulau-pulau sebetulnya merupakan sebuah perkembangan mencolok dari pola pemukiman asli di atas perahu, yang berpindah-pindah dengan mobilitas tinggi dari satu tempat ke tempat-tempat lainnya menurut kehendak penghuninya. Perahu dayung atau bermotor 54ltern digunakan sebagai sarana angkutan utama masyarakat antara daratan dengan permukiman penduduk, termasuk perdagangan bahan makanan pokok. Beberapa pemukiman suku Bajo di Sulawesi, pemerintah daerah berusaha membangun jembatan konstruksi beton dari arah pantai melewati kawasan

padat hutan mangrove dan padang lamun, hanya sebatas area pasang-surut dan tak mencapai perumahan, namun masyarakat tak menyetujui dengan akan masuk sepeda motor ke permukiman hingga pencaharian ojek perahu penduduk akan hilang. Alasan lain berupa semakin luas kerusakan mangrove dan padang lamun akibat konstruksi jembatan, dan tak dapat dihindari kebisingan, asap dan oli buangan mesin sepeda motor mencemari perairan laut. Secara kultural, orang Bajo masih tergolong masyarakat sederhana dan hidup menurut tata kehidupan lingkungan laut, dikenal sebagai pengembara lautan (*sea gypsies*), yaitu hidup dengan mata pencaharian yang erat hubungannya dengan lautan, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan menangkap ikan di lautan (Mamar, 2005:1).

Pembangunan intern ekonomi dan perkembangan akses penduduk memungkinkan penyebaran masyarakat Bajo ke wilayah pesisir lain. Suku Bajo yang terkenal sebagai pelaut ulung saat ini telah berdiapora di beberapa wilayah lain di Indonesia. Dalam pergaulan mereka harus menguasai bahasa daerah setempat, bahkan lebih jauh lagi menikah dengan orang etnis setempat, menjadi pegawai negeri. Kasus-kasus dinamika kehidupan seperti ini ditemui di daerah Luwu, Selayar, daerah Kolaka, dan lain-lain. Kebanyakan dari mereka yang sudah jauh berinteraksi dengan masyarakat setempat, menguasai bahasa setempat, dan sudah beranak bercucu mengaku sebagai orang Bugis, Makassar atau Buton. Dalam kepustakaan antropologi, strategi bertahan hidup seperti ini disebut '*ethnic marker*' (Lampe, 2011). Istilah atau sebutan Bajo, Orang Bajo, atau Suku Bangsa Bajo lebih dikenal di kawasan Indonesia bagian Timur, yaitu suatu kesatuan setempat atau kelompok masyarakat yang dapat ditemukan di kepulauan dan perairan laut Sulawesi Selatan (selat Makassar, teluk Bone, Bajoe), Sulawesi bagian Utara (Kimabajo, pulau Nain, Torosiaje), Sulawesi bagian Tengah dan Timur (teluk

Tomini, Kepulauan Togian dan Banggai), Sulawesi Tenggara (seperti, Lasolo, Tinanggea, Pulau Saponda, Tiworo Kepulauan (Tikep), Wakatobi (Wanci, Kaledupa, Tomia), Pasarwajo, Mawasangka, serta wilayah Kolaka, Pomala, Watubangga, Wolo, Lasusua, Pakue); Kalimantan Timur (sekitar Bontang, termasuk Sabah Timur dan kepulauan Sulu); Nusa Tenggara Timur (Alor, Kupang, dan Flores dan sekitarnya); Nusa Tenggara Barat (Bungin); dan Maluku Utara (Bacan). Di wilayah Indonesia bagian Barat (seperti Riau), kelompok masyarakat seperti suku Bajo disebut Rakyat Laut, Orang Laut, atau Suku Laut. Sementara di Sabah Malaysia, Brunei Darussalam dan Philipina, serta orang-orang Portugis dan para peneliti orang-orang yang mendiami pulau-pulau kecil, hidup dalam perahu dan/atau *seminomaden* di laut dalam wilayah Asia Tenggara banyak menggunakan sebutan Orang Bajau, Suku Asli, Sama Bajau, Sama Difaut, Bajau Laut, orang Samai, atau Samai Bajau Laut.

Ketergantungan masyarakat Suku Bajo di berbagai tempat terkait pemanfaatan sumberdaya di pesisir pantai memiliki ciri yang sama. Pada umumnya mereka hidup sebagaimana moyangnya yaitu hidup dari hasil laut. Selain kepala keluarga, anak yang sudah remaja berkewajiban membantu orang tua yang bekerja sebagai nelayan. Peran ibu rumah tangga adalah membantu suami menjual tangkapan hasil lautnya ke pasar, membimbing dan mendidik anak-anaknya dalam mengajarkan tentang kearifan lokal, kejujuran, tatakrama, sopan santun, penanaman nilai-nilai agama dan tanggung jawab, terutama kepada anak yang masih usia balita dan remaja. Masyarakat Bajo memiliki kemampuan mengumpulkan hasil laut yang ditunjang pemahaman kondisi dan jenis karang yang diperoleh secara turun temurun (Sangadji, 2009). Mereka memiliki pembagian terhadap tipe terumbu karang yaitu *sappa*, *lana*, dan *timpusu*. Sedangkan dalam hal tehnik tangkap untuk

memanfaatkan sumber daya laut, sebagaimana juga dijelaskan oleh Hutabarat (2001) dalam Sangadji (2011), masyarakat Bajo memiliki berbagai teknik tangkap, diantaranya *missi* (memancing), *ngarua* (memukat), *mana* (memanah dengan menggunakan alat tradisional), dan *nyuluh/balobe* atau yang biasa dikenal dengan *ngobor* (dengan menggunakan petromaks). Contoh cara pemanfaatan sumberdaya, adat dan organisasi masyarakat yang terkait dapat dijelaskan di dalam beberapa contoh kasus pada masyarakat suku Bajo yang berbeda berikut ini.



2. 1. Suku Bajo di Teluk Bone

Kelompok nelayan tradisional suku Bajo di Teluk Bone masih banyak yang bergantung pada aktifitas nelayan yaitu mencari ikan (Hasman, 2009; Anonimus, 2013). Luas seluruh wilayah Desa Bajo meliputi areal seluas 5,58 km². Mata pencaharian penduduk yang paling banyak adalah sebagai nelayan. Suku Bajo sebagai nelayan dapat menikmati hasilnya dengan segera. Sebagai nelayan mereka mengenal tiga lokasi penangkapan ikan, yaitu di perairan dalam, di gugusan karang, dan di pantai. Mereka menggunakan berbagai peralatan tradisional yang dibuat sesuai lokasi penangkapan. Bagi nelayan perairan dalam, peralatan yang digunakan untuk menangkap ikan berupa panah, tombak, dan pancing. Bagi nelayan yang mencari ikan di gugusan karang selain menggunakan panah dan tombak, mereka juga menggunakan alat yang disebut *bunre*.

2.2. Pola Perkampungan Menetap: Fenomena Umum Komunitas Suku Bajo di Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan Lampe (2011) bahwa di Sulawesi Selatan, khususnya Desa Bajoe Bone, Pulau Sembilan Sinjai, dan beberapa tempat di Selayar (Appa, Tana, Jampea, Kayuadi, Bonerate, Kawasan Taka Bonerate, dan lain-lain), komunitas-komunitas Bajo pada umumnya telah memiliki 56lterna atau desa induk permanen. Bahkan sudah ada beberapa keluarga mendapatkan lahan perumahan yang letaknya hingga beberapa ratus meter dari bibir pantai. Karena mampu beradaptasi fisik/alam dan budaya di darat sehingga sebagian di antaranya berkecukupan kecil-kecilan, beternak (memelihara beberapa ekor), menjual bahan kebutuhan pokok sehari-hari. Dalam pergaulan mereka harus bergaul dengan orang etnis setempat, juga dalam pengangkatan menjadi pegawai negeri. Mata pencaharian komunitas Bajo di daerah-daerah tersebut kini tidak terbatas pada kegiatan nelayan semata. Kasus-kasus dinamika kehidupan seperti ini ditemui di daerah Luwu, Selayar, daerah Kolaka, dan lain-lain. Kebanyakan dari mereka yang sudah jauh berinteraksi dengan masyarakat setempat, menguasai bahasa 56lter, dan sudah beranak bercucu mengaku sebagai orang Bugis, Makasar atau Buton. Meskipun demikian, tetap saja masih ada beberapa desa Bajo yang melakukan migrasi musiman ke dan tinggal beberapa bulan pada musim timur di beberapa pulau karang seperti Pulau Tarupa Kecil, Pulau Tinabo Bungin Belle dan Pasitallu Barat untuk mendekati daerah penangkapan ikan (*fishing grounds*).

2.3 Budidaya Laut di Batanglampe, Pulau Sembilan

Beberapa kelompok keluarga nelayan Bajo kini tidak hanya melakukan ekstraksi atau penangkapan ikan saja. Nelayan Bajo di Pulau Sembilan (Sinjai) telah mencoba

budidaya rumput laut, pembesaran bibit lobster dan kerang (japing, mutiara) dalam keramba sejak beberapa tahun sejak tahun 1995 (Lampe, 2011). Usaha budidaya di Pulau Sembilan tersebut sebetulnya diupayakan sebagai usaha 56lternative nelayan dari aktivitas utama berupa menangkap ikan, yang dari hari ke hari hasilnya semakin merosot akibat dari penangkapan berlebih dan kerusakan habitat terumbu karang. Meskipun belum lama dicoba oleh sebagian komunitas nelayan, namun praktik budidaya laut telah terbukti menunjukkan tanda-tanda dampak positifnya baik dalam segi ekonomi maupun pemulihan kerusakan ekosistem terumbu karang yang disebabkan perilaku nelayan pengguna bahan peledak dan bus beracun. Berdasarkan beberapa contoh kasus di atas, terlihat bahwa suku Bajo beradaptasi dengan perubahan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memanfaatkan sumber daya alam, suku Bajo masih menerapkan cara-cara tradisional yang ramah lingkungan dan terbukti mampu memenuhi kebutuhan subsistennya. Namun, suku Bajo juga ternyata tidak anti terhadap hal-hal baru. Mereka beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan pemanfaatan sumberdaya lain di luar cara-cara tradisionalnya.

3. Kearifan Lokal Suku Bajo

Kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang kita dalam tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat istiadat (Basuni, 2012). Dalam perkembangannya, masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipadu dengan norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Konsep kearifan lokal menurut Mitchell, *et al.* (2000) berakar dari pengetahuan dan pengelolaan atau tradisional. Kearifan adalah kumpulan pengetahuan dan cara berpikir yang berakar dalam kebudayaan suatu kelompok

manusia, yang merupakan hasil pengamatan selama kurun waktu yang lama (Babcock, 1999 sebagaimana dikutip oleh Arafah, 2002). Undang-undang No. 32 Tahun 2009 memberikan pengertian tentang kearifan, yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Sirtha (2003) sebagaimana dikutip oleh Sartini (2004) dalam Aulia dan Darmawan (2010), menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kearifan yang ada dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Bentuk yang bermacam-macam ini mengakibatkan fungsi kearifan menjadi bermacam-macam pula. Fungsi tersebut antara lain adalah: 1). Untuk konservasi dan pelestarian sumberdaya alam; 2). Untuk pengembangan sumber daya manusia; 3). Berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan; 4). Sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan; 5). Bermakna misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat; 6). Bermakna, misalnya pada upacara daur pertanian; 7). Bermakna etika dan moral; 8). Bermakna politik, kearifan yang terkait dengan kebudayaan, memiliki arti penting untuk menjaga keberlanjutan kebudayaan, sekaligus agar selalu terjaga kelestariannya. Makmur (2011) menuturkan, dalam pengertian kebahasaan kearifan, berarti kearifan setempat (*local wisdom*) yang dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai yang tertanam dan diikuti oleh warga masyarakatnya. Dalam konsep antropologi, kearifan dikenal pula sebagai pengetahuan setempat (*indigenous or local knowledge*), atau kecerdasan setempat (*local genius*), yang menjadi dasar identitas kebudayaan (*cultural identity*). Sementara pengertian kearifan (tradisional) menurut Keraf (2002) adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun

perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Dijelaskan pula bahwa kearifan lokal/tradisional bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara penghuni komunitas ekologis ini harus dibangun.

Pengertian di atas memberikan cara pandang bahwa manusia sebagai makhluk integral dan merupakan satu kesatuan dari alam semesta serta perilaku penuh tanggung jawab, penuh sikap hormat dan peduli terhadap kelangsungan semua kehidupan di alam semesta serta mengubah cara pandang antroposentrisme ke cara pandang biosentrisme dan ekosentrisme. Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam suatu sistem sosial masyarakat, dapat dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya yang sekaligus membentuk dan menuntun pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap alam maupun terhadap alam. Tradisi yang diwarisi turun temurun, kebiasaan atau perilaku ini tumbuh dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan berkembang sesuai kedekatan manusia dengan alam di sekitarnya dan tantangan yang dihadapinya. Ini merupakan kearifan lokal yang mewarnai kehidupan masyarakat. Kearifan lokal dipandang sebagai tindakan dan sikap manusia terhadap sesuatu objek atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Substansi kearifan lokal adalah berlakunya nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh suatu masyarakat dan mewarnai perilaku hidup masyarakat tersebut (Anonimus, 2013). Nababan (2003) mengatakan bahwa masyarakat adat umumnya memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal yang diwariskan dan ditumbuh-kembangkan terus-menerus secara turun temurun. Pengertian masyarakat adat di sini adalah mereka yang secara tradisional tergantung dan memiliki ikatan sosiokultural dan

religius yang erat dengan lingkungan lokalnya. Pandangan ini sejalan dengan dasar dari Kongres I Masyarakat Adat Nusantara tahun (1999) yang menyatakan bahwa masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun temurun atas satu wilayah adat, yang diatur oleh adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan soaial budaya yang diatur oleh adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris karena perbedaan sumberdaya yang mereka hadapi atau miliki. Melihat dari perspektif antropologis, masyarakat pesisir nelayan berbeda dari masyarakat lain, seperti masyarakat petani, perkotaan atau masyarakat di dataran tinggi. Perspektif antropologis ini didasarkan pada realitas 58ating bahwa masyarakat nelayan memiliki pola-pola kebudayaan yang berbeda dari masyarakat lain sebagai hasil dari interaksi mereka dengan lingkungan beserta sumberdaya yang ada di dalamnya. Pola-pola kebudayaan itu menjadi kerangka berpikir atau referensi perilaku masyarakat nelayan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tindakan nyata, sikap dan perilaku manusia terhadap lingkungan yang mengandung nilai-nilai pelestarian ekosistem adalah bagian dari kecerdasan ekologis suatu masyarakat, misalnya yang berlaku bagi masyarakat pesisir dan ternyata cukup efektif dalam mengelola sumber daya alam, serta upaya pelestarian ekosistem laut dari aktifitas yang bersifat destruktif dan merusak (Anonimus, 2013).

Komunitas suku Bajo memiliki kearifan berupa tradisi, aturan atau pantangan turun temurun yang dipraktikkan, dipelihara dan ditaati masyarakat Bajo dalam menjaga dan memanfaatkan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Kearifan tersebut mengandung nilai pelestarian ekosistem perairan laut dan pesisir. Keunikan suku

Bajo seperti yang dituturkan Hamzah (2008), memiliki seperangkat kearifan dalam pengelolaan pesisir dan laut karena kaitannya yang sangat erat yang menjadikan laut sebagai tempat keramat dan dimiliki nenek moyang mereka dengan suku lain seperti Bugis-Makassar yang mampu menyelenggarakan kehidupannya di semua tempat. Dengan kearifan 58atin, masyarakat suku Bajo menjaga kelestarian ekosistem dan SDA pesisir dan laut sebagai sumber kehidupan. Menurut Utina(2012), masyarakat Bajo, khusus generasi tua, masih mempercayai gugusan karang tertentu sebagai tempat bersemayam arwah para leluhur. Orang tua melarang anggota keluarga menangkap ikan dan biota lain di sekitar gugusan karang, kecuali terlebih dahulu melakukan ritual tertentu dengan menyiapkan sajian bagi leluhur. Segala pantangan yang mencemari laut dihampar sebagai ritual yang itu kemudian rutin dilakukan dalam masyarakat Bajo. Banyak dari generasi mereka menjadikan ritual itu sebagai media menggumuli laut, mengintiminya, menunjukkan kecintaannya. Dalam penelitian suku Bajo di Kepulauan Tiworo dan Napa Balano Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Bahtiar (2012) menyatakan bahwa suku Bajo memiliki seperangkat kearifan ekologi yang dapat dikreasi dan digunakan sebagai salah satu model dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Salah satunya seperti *pamali* dan *ongko*. Masyarakat Bajo sangat percaya bahwa mereka tidak boleh merusak tempat yang melanggar *pamali*, jika mereka merusaknya maka dipercaya akan mendapat hukuman atau kutukan dari *Mbo* (pemberi rezeki). Keyakinan suku Bajo percaya *Mbo* merupakan penguasa laut yang memberikan isi lautnya untuk semua manusia. Konsep hidup secukupnya dituangkan dalam aturan batas melaut yaitu sejauh kayuh sampan, sekuat tangan mendayung. Ketika melaut, sedikitnya dua ekor ikan hasil tangkapan harus diberikan kepada *Mbo* (dikembalikan ke laut). Mengenai perilaku memperoleh

hasil tangkapan, suku Bajo menggunakan peralatan tradisional yang tentunya tidak merusak perairan laut dan terumbu karang, seperti pancing, tombak, panah dan bubu (perangkap). Hal yang mengesankan adalah, ikan diberi kesempatan untuk mencapai suatu stadium dewasa hingga dapat berkembangbiak, dengan demikian sumberdaya hayati laut berpeluang untuk meningkatkan populasinya guna mempertahankan spesiesnya.

Hasil studi Utina (2012) pada suku Bajo di Desa Torosiaje, Provinsi Gorontalo, bahwa kedekatan emosional masyarakat Bajo dengan sumber daya laut memunculkan tradisi *mamia kadialo* berupa pengelompokan orang ketika ikut melaut dalam jangka waktu tertentu serta perahu yang digunakan. Ada tiga kelompok tradisi ini: *palilibu*, *bapongka*, dan *sasakai*. *Palilibu* adalah kebiasaan melaut yang menggunakan perahu jenis *soppe* yang digerakkan dengan dayung, kegiatan melaut ini hanya dalam 1-2 hari, kemudian kembali ke permukiman menjual hasil tangkapan dan sebagian dinikmati bersama keluarga. *Bapongka* (*babangi*) merupakan kegiatan melaut selama beberapa minggu bahkan bulan dengan menggunakan perahu besar berukuran 4 x 2 yang disebut *leppa*, dan biasanya keluarga ikut serta dibawa, bahkan ada yang hingga melahirkan anak di atas perahu. *Sasakai*, yaitu kebiasaan melaut menggunakan beberapa perahu untuk melaut selama beberapa bulan dengan wilayah jelajah antar pulau.

Terdapat pamali lain yang ternyata juga memiliki nilai kelestarian lingkungan. Pamali tersebut adalah larangan untuk menangkap ikan yang berukuran kecil dan memakannya. Mereka hanya boleh mengkonsumsi ikan yang memiliki ukuran besar atau layak panen. Norma lain yang berlaku adalah menghormati laut. Suku Bajo sangat menghormati laut karena merupakan sumber penghidupannya. Bagi suku Bajo, adalah pamali untuk mengucapkan kata-kata yang tidak pantas atau mengumpat di laut. Hal tersebut

menunjukkan betapa Suku Bajo sangat menghargai laut. Suku Bajo sangat takut melanggar pamali. Mereka beranggapan akan mendatangkan malapetaka dan musibah apabila melanggar pamali. Malapetaka atau musibah tersebut dapat 59ating dalam berbagai bentuk seperti tidak memperoleh ikan, badai, ombak besar, dsb.

4. *Bapongka* sebagai Suatu Sistem Budaya dalam Kehidupan Sehari-hari Suku Bajo

4.1. *Bapongka*, Aturan/Pantangan, Pelaksanaan dalam Kehidupan Sehari-hari dan Nilai yang Terkandung di Dalamnya

Bapongka merupakan kegiatan memanfaatkan sumber daya laut sekaligus sebagai kegiatan perlindungan eksploitasi hasil laut dalam jangka waktu tertentu. *Bapongka* seringkali dianggap sebagai elemen pengelolaan sumber daya laut dan pesisir dengan tujuan keberlanjutan (Walhi Sulteng, 2001: 20). Utina (2014) mengartikan *Bapongka* (*babangi*) sebagai kegiatan melaut suku Bajo yang dilakukan secara berkelompok selama beberapa minggu bahkan bulan dengan menggunakan perahu besar berukuran 4 x 2 yang disebut *leppa* atau juga yang menyebutnya *sopek*. Biasanya keluarga ikut serta dibawa, bahkan ada yang hingga melahirkan anak di atas perahu. *Bapongka* bagi masyarakat suku Bajo merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk mencari nafkah. *Bapongka* memiliki sifat gotong royong dan nilai kebersamaan yang dapat diartikan sebagai upaya untuk mempererat tali silaturahmi antara sesama anggota keluarga, karena kegiatan *Bapongka* umumnya dilakukan dengan mengikutsertakan keluarga (isteri dan anak-anak) dan juga sesama nelayan, karena *Bapongka* juga dilaksanakan dengan cara berkelompok dengan menggunakan 3 sampai 4 perahu yang berangkat beriringan.

Berdasarkan penelitian dengan metode wawancara yang dilakukan oleh Utina

(2014) pada masyarakat suku Bajo di pesisir Desa Bonggan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, ada juga yang melakukan *Bapongka* tanpa membawa keluarga seperti yang dituturkan oleh Bapak Songge (60 tahun):

“Kami melakukan *Bapongka* jarang membawa istri, tetapi bersama dengan beberapa teman laki-laki dengan menggunakan 3 – 4 perahu. *Bapongka* tidak saja melakukan penangkapan ikan dengan memancing tetapi juga menyelam teripang”.

Beliau terserang kelumpuhan saat melakukan penyelamanan. Menurutnya saat menyelam dia menangkap udang yang berwarna kuning, tetapi setelah diangkat ke perahu tiba-tiba udang itu menghilang dan seluruh tubuh Bapak Songge terasa lumpuh, hal itu terjadi sepuluh tahun yang lalu. Sampai saat ini Bapak Songge masih tetap lumpuh. Menurut penuturan beliau ada di antara temannya yang membuang air cucian beras ke laut saat itu, padahal merupakan salah satu pantangan yang tidak boleh dilakukan saat *Bapongka*. Pendapat lain menurut penuturan Bapak Udir Tanjungbulu (56 tahun) bahwa *Bapongka* biasa dilakukan dengan membawa serta anak dan istri untuk mencari nafkah di laut selama berminggu-minggu atau bahkan sebulan. Tetapi saat ini anak-anaknya tidak ada lagi yang ikut *Bapongka* karena sudah memasuki usia sekolah.

Kegiatan *Bapongka* dilakukan untuk mengumpulkan hasil laut seperti teripang dan jenis ikan bergerombol (*schooling fish*) sejenis *lolosi* atau ekor kuning (*Caesio* sp.) Sangadji (2011). Hasil tangkapan dari *Bapongka* sama dengan hasil tangkapan hari-hari biasa, hanya saja kalau *Bapongka* hasil tangkapan terkumpul. Hasil tangkapan dijual ke kampung terdekat dengan cara tukar-menukar, misalnya ikan ditukar dengan beras, ubi, sagu, dan lain-lain, oleh karena itu pada saat melakukan *Bapongka* para nelayan tidak membawa bekal bahan makanan karena bahan

makanan dapat diperoleh dengan cara tersebut. Hasil tangkapan yang diperoleh selama melakukan *Bapongka* selain ditukar dengan bahan makanan juga diolah menjadi dendeng dan ikan asin. Pengolahan ikan hasil tangkapan menjadi dendeng atau ikan asin dilakukan di daratan terdekat, tetapi kalau daratan masih jauh biasanya dilakukan di atas karang (*reef*) tetapi dengan syarat tidak merusak terumbu karang. Selain ikan terdapat juga kerang-kerangan yang disimpan di dalam perahu yang nantinya akan dijual setelah kembali dari kegiatan *Bapongka*.

Dalam kehidupan suku Bajo ada sejumlah aturan-aturan atau pantangan khusus yang harus ditaati oleh setiap nelayan, baik pada saat melaut atau pada saat tidak melaut, terutama apabila sedang melaut yang mereka sebut *Bapongka*. Aturan atau pantangan yang dimaksud berupa hal-hal yang tidak dapat dilakukan antara lain tidak boleh membuang ke laut: 1) air cucian beras/teripang, 2) arang kayu bekas memasak, 3) ampas kopi, 4) air cabe, 5) air jahe, 6) kulit jeruk, air perasan jeruk, 7) abu dapur dan (8) puntung/abu rokok. Pada saat mencuci beras air cucuannya ditampung di dalam perahu. Air cucian beras tersebut akan dibuang setelah mendekati daratan. Demikian juga dengan arang kayu bekas memasak, abu dapur, kulit jeruk, air cabe dan air jahe. Pantangan-pantangan tersebut bagi orang Bajo diyakini akan menyebabkan datangnya malapetaka, misalnya angin kencang, ombak besar dan munculnya hantu laut yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hasil tangkapan. Apabila aturan atau pantangan ini dilanggar maka hasil yang diperoleh akan berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Pantangan-pantangan yang ada apabila ditaati maka akan mendatangkan hal-hal yang positif atau dengan kata lain menghindari hal-hal yang negatif untuk memperoleh hal-hal yang positif.

Masyarakat suku Bajo 100% beragama Islam beranggapan bahwa *Bapongka* adalah upaya untuk lebih

mendekatkan diri kepada sang Khaliq. Kegiatan *Bapongka* lebih intensif dilaksanakan pada saat menjelang bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Adha, sebagai upaya untuk menabung guna mempersiapkan keperluan selama bulan Ramadhan sehingga pada bulan tersebut semata-mata hanya untuk beribadah.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Lando Mellok (62 tahun) sebagai tokoh masyarakat, sebagai berikut:

“Menurut saya *Bapongka* atau disebut juga *Babangi* adalah bermalam di laut selama 3 hari sampai sebulan dan dilaksanakan mendekati bulan suci Ramadhan untuk mempersiapkan kebutuhan hidup selama bulan puasa. Jadi, saat bulan puasa hanya semata-mata untuk beribadah”.

Menurutnya, waktu melakukan *Bapongka* tergantung kesiapan lahir-bathin dan ada ketentuan-ketentuan khusus saat melakukan *Bapongka*, antara lain tidak boleh membuang abu dapur dan garam ke laut karena bisa mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan misalnya angin kencang.

Bapongka tidak saja dilakukan menjelang bulan suci Ramadhan tetapi juga dilaksanakan karena ada kebutuhan yang sudah direncanakan, misalnya menjelang hari raya Idul Adha. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rauf (60 tahun) bahwa *Bapongka* dimaksudkan sebagai upaya mencari nafkah untuk menabung guna memenuhi kebutuhan yang direncanakan tanpa melanggar aturan-aturan atau pantangan yang ada.

Tetapi dalam kegiatan *Bapongka* ada sebagian kecil orang Bajo yang melanggar pantangan-pantangan untuk memperoleh hal-hal yang positif, seperti, menjatuhkan panci ke laut menyebabkan datangnya angin kencang yang membantu mereka agar bisa mencapai daratan lebih cepat dengan menggunakan layar. Saat melaut para nelayan sering mendapat kesulitan mengemudikan perahunya, yaitu apabila sedang dalam perjalanan tiba-tiba angin

tidak datang dan ombakpun berkurang, maka layarnya tidak dapat berfungsi karena sumber tenaganya tidak ada. Kesulitan seperti ini dapat ditanggulangi bila mereka menggunakan dayung dan tongkat. Ini dapat dilaksanakan apabila sudah berada di tempat-tempat yang sudah agak dangkal. Namun, bila mereka berada pada tempat yang masih dalam, mereka terpaksa menunggu datangnya angin. Bagi nelayan yang ingin cepat sampai kadang-kadang melanggar pantangan-pantangan dengan menjatuhkan panci atau cukuran ke laut. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Taher (47 tahun) bahwa, tidak boleh menjatuhkan cukuran kelapa dan panci ke laut karena dapat menyebabkan datangnya angin kencang. Menurut pengakuan beliau bahwa pernah suatu saat ketika hendak pulang dari *Bapongka*, karena sudah kelelahan mendayung dan angin tidak bertiup mereka menjatuhkan panci ke laut dan mengikatnya di perahu kemudian di seret, tak lama kemudian datang angin kencang dan mereka memasang layar sehingga perahu melaju dengan cepat, dengan demikian mereka cepat sampai ke daratan.

Hal-hal lain yang biasanya menyulitkan juga bagi nelayan adalah apabila sudah tiba waktunya berangkat ke laut, sedangkan angin bertiup dari arah yang berlawanan dengan yang dituju, maka mereka harus memilih jalan yang berliku-liku, yaitu berlayar dengan membentuk sudut enam puluh derajat. Perjalanan yang demikian oleh orang Bajo disebut *tatadaa*. Perjalanan semacam itu memerlukan waktu yang agak lama, walaupun tempat yang dituju tidak terlalu jauh.

Bapongka juga mengandung nilai sosial yang digambarkan dengan adanya kebiasaan untuk saling menolong apabila ada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Satu hal yang patut diteladani adalah seperti yang diungkapkan oleh Bapak Tibu (57 tahun) bahwa, apabila hendak melaut kemudian ada seseorang yang meminta (misalnya beras) adalah sebuah pantangan apabila mengatakan

tidak ada, karena ada hubungannya dengan hasil tangkapan maka bisa jadi tidak mendapatkan hasil walaupun mungkin persediaan beras yang dipunyai hanya terbatas untuk keluarga. Dengan demikian, ada suatu harapan bahwa apabila kita memberi maka akan dibalas dengan hasil tangkapan yang lumayan, dan itu selalu terbukti.

Penerapan *Bapongka* dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari adanya upaya masyarakat suku Bajo untuk mentaati aturan-aturan atau pantangan-pantangan yang ada baik pada saat melaut maupun pada saat tidak melaut. Pantangan juga harus ditaati oleh keluarga nelayan yang tidak ikut serta melaut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Rohani (56 tahun) bahwa, bagi istri yang ditinggalkan di rumah diamanatkan untuk tidak membuang arang/abu dapur, dan sampah hasil menyapu dalam rumah maupun di halaman sampai suami pulang. Jadi sampah-sampah tersebut ditampung kemudian dibuang setelah suami kembali dari *Bapongka*. Hasil pengamatan dan wawancara mendalam (Utina, 2014) ditemukan pada sebagian masyarakat suku Bajo beranggapan bahwa pantangan/aturan dalam *Bapongka* hanya berlaku pada saat melaut, sedangkan sebagian lainnya tetap mematuhi aturan/ pantangan yang ada yaitu dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari baik pada saat melaut maupun pada saat tidak melaut.

Adanya pantangan-pantangan untuk tidak membuang sampah tertentu ke laut baik pada saat melaut maupun bagi yang tidak ikut melaut, menggambarkan bahwa di dalam *Bapongka* terkandung nilai-nilai pendidikan pelestarian lingkungan. Tanpa disadari oleh orang Bajo, bahwa pantangan dalam *Bapongka* adalah merupakan salah satu upaya untuk melestarikan ekosistem laut dan pesisir yang didiami oleh mereka. Sampah-sampah yang dibuang ke laut dapat mencemari lingkungan pesisir dan laut yang pada gilirannya akan menyebabkan menurunnya hasil tangkapan. Pantangan yang ada pada

Bapongka umumnya berisi tentang larangan untuk tidak membuang sampah ke laut, antara lain adalah tidak boleh membuang abu dapur, arang bekas memasak, ampas kopi, air cucian beras, kulit jeruk, air cabe, air jahe ke laut. Berdasarkan hasil wawancara (Ramli Utina, 2014) bahwa abu dapur dapat digunakan untuk menghilangkan kulit ari pada anemon laut, dengan demikian abu dapur merupakan salah satu bahan pencemar bagi ekosistem laut. Hal yang masih perlu diteliti lagi apakah abu dapur juga dapat menyebabkan kematian bagi organisme lain selain anemon laut. Arang kayu bekas memasak juga tidak boleh dibuang ke laut, karena mengandung carbon yang dapat menyebabkan keracunan pada hewan laut apabila berlebihan. Membuang air cucian beras juga merupakan salah satu pantangan dalam *Bapongka*. Air cucian beras kalau dibuang ke laut akan dapat menyebabkan kekeruhan air laut yang dapat menghalangi masuknya sinar matahari ke dalam laut. Air cucian beras mungkin tidak dapat menyebabkan kekeruhan bagi permukaan laut yang begitu luas, tetapi hal ini memberikan pendidikan lingkungan bahwa laut dan pesisir harus tetap dilestarikan. Sementara air cabe, air jahe dan kulit jeruk sifatnya sama dengan tuba, dapat menyebabkan kematian bagi organisme laut.

Menurut penuturan Bapak Bardi (56 tahun) mantan kepala desa, bahwa ampas kopi tidak boleh dibuang ke laut karena ampas kopi sama dengan tinta cumi (hitam) yang menyebabkan munculnya ikan besar. Dengan demikian ikan-ikan kecil akan menjauh dan tentu saja hasil tangkapan akan berkurang. Selanjutnya penuturan Bapak Bardi;

”Menurut saya, *Bapongka* adalah mencari nafkah di laut. Saat ini masih ada yang melakukan tapi bukan hanya untuk memancing tapi menyelam untuk mencari teripang, lolak dan tapi-tapi. Pantangan saat *Bapongka* adalah tidak boleh membuang air cucian

beras, ampas kopi dan kulit jeruk. Ampas kopi dapat menyebabkan munculnya ikan besar karena ampas kopi sama dengan tinta cumi (hitam). Kulit jeruk kalau dibuang ke laut menyebabkan munculnya hantu laut”.

Menurut penuturan Bapak Rauf (60 tahun) tokoh adat yang juga pensiunan guru, bahwa saat melaksanakan *Bapongka* harus memperhatikan posisi bintang, misalnya ada bintang tertentu yang apabila tampak pada waktu Magrib berwarna merah maka saat itu tangkapan yang diperoleh lebih banyak. Lain lagi yang dikemukakan oleh Bapak Udir Tanjungbulu (56 tahun) bahwa, *Bapongka* dilakukan dengan memperhitungkan posisi bintang/bulan di langit misalnya bulan 1 atau 2 di langit tidak bisa melaut karena angin kencang, bulan 3 dan 4 di langit boleh melaut karena laut dalam keadaan (gelombang) tenang.

Menurut Utina (2014), secara umum masyarakat suku Bajo yang mendiami pesisir desa Bongganan beranggapan bahwa tidak ada hubungan antara pantangan-pantangan yang ada dalam kegiatan *Bapongka* dengan kerusakan ekosistem laut dan pesisir misalnya terumbu karang. Menurut mereka, kerusakan ekosistem yang ada di desa Bongganan adalah karena adanya kegiatan penangkapan ikan yang tidak memperhitungkan kelestarian ekosistem yang mereka diami.

Seperti yang diuraikan oleh Bapak Usman Onde (50 tahun);

“Menurut saya adalah merupakan ikhtiar bukan pantangan. Kalau hal ini dilanggar bisa mendatangkan malapetaka, misalnya hantu laut dan anginkencang, dan itu sering terjadi. Pantangan-pantangan misalnya jangan membuang arang bekas memasak, abu dapur untuk menghindari datangnya malapetaka tapi bukan untuk merusak kelestarian dan tidak ada pengaruhnya terhadap kelestarian lingkungan.”

Menurut beliau, bahwa tidak ada hubungan antara kerusakan terumbu karang dengan membuang arang, abu dapur dan ampas kopi. Kerusakan terumbu karang dan padang lamun akibat pencemaran oleh bahan bakar dari perahu bermotor. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Udir Tanjungbulu (56 tahun), bahwa rusaknya terumbu karang karena kegiatan pengeboman dan pembiusan ikan, penangkapan ikan karang dan pengambilan anemon laut.

Berbeda dengan apa yang dikemukakan di atas, Bapak Rauf (60 tahun) berpendapat bahwa orang tua dahulu tidak mengetahui atau belum memahami bahwa membuang ampas kopi, air cucian beras, abu dapur dan arang bekas memasak dapat menyebabkan kerusakan terumbu karang. Selanjutnya Bapak Rauf menjelaskan bahwa abu dapur sifatnya sama dengan bius yang dapat menyebabkan ikan mabuk dan akhirnya mati. Hal ini dipertegas oleh Samra (21 tahun) bahwa cara mengolah anemon laut untuk dapat dimakan adalah terlebih dahulu anemon tersebut dilumuri dengan abu dapur agar kulit arinya terkupas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa abu dapur dapat menyebabkan kematian bagi organisme laut, salah satunya adalah anemon laut.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, Utina (2014) mendeskripsikan bahwa upaya untuk melestarikan ekosistem laut sudah diterapkan, walaupun upaya tersebut tidak disadari. Upaya yang dimaksud adalah pantangan-pantangan pada saat melakukan *Bapongka*.

Menurut pengamatan Utina (2014) dengan bergesernya kebutuhan ekonomi dan adanya desakan untuk melakukan pemungutan hasil laut dengan cara cepat, murah, mudah dan hasil besar, maka budaya ini mulai ditinggalkan. Sebagian nelayan menggunakan bahan peledak/bom, racun dan cara-cara tidak ramah lingkungan lain dalam menangkap ikan dan hasil laut lainnya. Terdapat sebagian

kecil masyarakat suku Bajo di desa Bongganan yang tidak peduli terhadap kerusakan ekosistem laut dan pesisir, seperti ditemukan ada remaja atau generasi muda suku Bajo yang merakit bom untuk menangkap ikan, dimana menurut mereka dengan menggunakan bom, sekali melaut dapat memperoleh hasil tangkapan yang jauh lebih banyak (± 50 kg) dari hasil tangkapan dengan memancing ($\pm 3-4$ kg). Hasil pengamatan, bahwa ekosistem laut yang ada di pesisir Desa Bongganan kondisinya memprihatinkan. Hutan mangrove yang menjadi formasi awal pantai tidak tampak lagi. Padang lamun yang merupakan tempat bertelur ikan masih dalam kondisi baik, namun demikian kehidupannya terganggu akibat pembuangan limbah rumah tangga. Sedangkan terumbu karang kondisinya sebagian besar telah rusak. Ekosistem di pesisir Bongganan mengalami kerusakan karena kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan *potassium sianida* (buis) selain bom. Penggunaan buis menyebabkan terumbu karang, plankton dan ikan kecil mati, akibatnya ikan besar menjauh untuk mencari hidup di tempat yang lebih aman, sehingga lokasi penangkapan ikan makin jauh. Adanya pengusaha yang menampung ikan hidup menyebabkan makin maraknya penangkapan ikan hidup dengan menggunakan buis sehingga nelayan pemancing ikan harus menempuh jarak yang sangat jauh untuk memperoleh hasil tangkapan, dan hasil yang diperoleh tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Hal ini menyebabkan nelayan kecil makin terhimpit dengan kemiskinan. Menurut penuturan Bapak Udir Tanjungbulu, bahwa biasanya hasil tangkapan berkisar antara 10-20 ekor, tetapi sekarang hanya memperoleh 4 sampai 5 ekor sekali melaut atau bahkan kadang-kadang tidak mendapatkan seekor ikan pun. Hasil tangkapan 5 ekor ikan dengan berat 10 kg dapat dijual dengan harga Rp. 8.000,-/ kg. Dengan demikian hasil pendapatan sekali melaut Rp.

80.000,- masih dipotong dengan biaya bahan bakar. Dengan penghasilan seperti itu tentunya belum mencukupi kebutuhan hidup keluarga Bapak Udir dengan jumlah jiwa 11 orang.

4.2. Pelaksanaan *Bapongka* Era Sekarang dan Generasi Muda Suku Bajo

Hasil penelitian Utina(2014), kalau dulu keterkaitan masyarakat suku Bajo di darat tidak ada, sehingga sebagian besar kegiatan hidupnya dilaksanakan di laut, namun *Bapongka* saat ini sudah jarang dilakukan, walaupun ada yang melakukannya tidak sampai berminggu tetapi hanya beberapa hari yaitu 3 hari sampai seminggu. *Bapongka* tidak sepenuhnya hilang, hanya karena dorongan untuk mencari hidup di darat lebih besar misalnya menjadi tukang ojek, tukang becak dan buruh bongkar muat di pelabuhan Salakan, maka sebagian masyarakat suku Bajo sudah jarang melakukan *Bapongka*, meskipun pantangan-pantangan yang ada tetap dilaksanakan oleh sebagian masyarakat. Walaupun *Bapongka* masih tetap dilaksanakan, caranya mulai berubah akibat kemajuan teknologi. Sekarang, masyarakat Bajo mulai menggunakan motor tempel sebagai penggerak perahu karena jarak yang jauh dapat ditempuh hanya dalam beberapa jam saja, meskipun demikian pantangan-pantangan yang ada dalam *Bapongka* tetap dilaksanakan karena hal ini diyakini sangat berpengaruh terhadap hasil tangkapan. Dengan adanya motor tempel maka bentuk perahu yang digunakan untuk *Bapongka* juga berubah. *Sopek* atau *leppa* adalah perahu yang digunakan untuk *Bapongka* yang berbentuk lebar untuk memuat semua keperluan hidup selama berminggu-minggu, kini bentuknya telah berubah menjadi perahu batang yang bentuknya memanjang dan sempit dilengkapi dengan motor tempel. Apabila ingin melaut sampai beberapa hari maka perahu tersebut diberi atap.

Bapongka bagi generasi sekarang tidak lagi dianggap sebagai suatu kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena bagi mereka sudah ada pekerjaan lain yang dapat dilakukan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kalaupun masih ada yang turun melaut, tidak sampai bermalam di laut, hanya berangkat pagi hari dan pulang sore hari atau berangkat subuh dan pulang siang hari, sehingga pada sore hari dapat melakukan kegiatan sebagai buruh bongkar muat di pelabuhan. Volume dan frekuensi kegiatan melaut yang sudah jarang dilakukan oleh generasi sekarang menyebabkan *Bapongka* jarang dilaksanakan, meskipun sebagian dari mereka tetap menerapkan pantangan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut penuturan Rusman (26 tahun), bahwa *Bapongka* tetap dilaksanakan walaupun waktunya lebih singkat antara 3 hari sampai seminggu. Aturan atau pantangan saat melakukan *Bapongka* masih tetap dilaksanakan. Selanjutnya Rusman yang pada saat ditemui sedang merakit bom ikan menjelaskan bahwa sebagian remaja suku Bajo saat ini jarang melaut, tetapi mereka memahami tentang *Bapongka* dengan segala aturan dan pantangan yang ada di dalamnya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Hirman (18 tahun), Sarip (20 tahun), Tomi (19 tahun) dan Andi (18 tahun). Menurut mereka, ada aturan-aturan dan pantangan-pantangan saat melaut yaitu tidak boleh membuang arang bekas memasak, abu dapur, ampas kopi, dan air cucian beras ke laut, dan mereka mengetahui tentang aturan-aturan dan pantangan-pantangan tersebut dari orang tua. Selanjutnya dikemukakan bahwa walaupun mereka jarang melaut tetapi penerapan *Bapongka* dalam kehidupan sehari-hari tetap dilaksanakan baik pada saat melaut maupun pada saat tidak melaut. Hal yang berbeda dikemukakan oleh Ridwan (17 tahun) bahwa tidak ada aturan atau pantangan waktu melaut, yang ada hanyalah anjuran

untuk tidak membuang arang bekas memasak dan ampas kopi (Ramli Utina, 2014).

Adanya pedagang yang berasal dari warga pendatang, menyebabkan suku lokal tertarik untuk berdagang kebutuhan pokok sehari-hari. Pendatang yang ada di desa Bongganan berasal dari suku Bugis, Buton, dan Gorontalo, dimana motivasi kedatangan mereka adalah untuk mencari kerja, umumnya belum berkeluarga. Bagi pendatang yang belum berkeluarga, telah membaur dengan masyarakat lokal melalui perkawinan sehingga menyebabkan mereka menetap. Suku Buton yang sudah menikah dengan suku lokal (Bajo) ikut melaut dan memang profesi mereka sebagai nelayan. Sedangkan pendatang yang bekerja sebagai pedagang berasal dari suku Bugis dan Gorontalo. Usaha dagang dirintis pertama kali oleh pendatang. Demikian pula dengan penarik becak dan ojek motor, diawali oleh pendatang dan akhirnya diikuti oleh suku lokal. Jadi kegiatan suku Bajo selain melaut, dilakukan bukan atas inisiatif sendiri tetapi mengikuti apa yang dilakukan oleh pendatang.

Hubungan antara masyarakat Bajo dengan para pendatang ini terjalin dengan baik. Hubungan tersebut terjadi karena pembauran akibat perkawinan. Bila ditinjau dari segi keberadaan *Bapongka* maka kehadiran masyarakat pendatang sangat mempengaruhi terhadap penerapan *Bapongka*, yaitu dengan adanya kegiatan melaut yang sudah jarang dilaksanakan bagi generasi sekarang. Secara tidak langsung keberadaan masyarakat pendatang mempengaruhi kehidupan suku Bajo yang ada di desa Bongganan. Bagi suku Bajo yang terikat perkawinan dengan pendatang misalnya suku Bugis, maka mata pencahariannya akan berubah dari nelayan menjadi pedagang. Hal ini berpengaruh terhadap beberapa warga masyarakat lokal yang tertarik menjadi pedagang, sehingga kegiatan melaut pun ditinggalkan. Dengan demikian, penerapan *Bapongka* dalam kehidupan sehari-hari

cenderung mulai ditinggalkan. Meskipun demikian, ini tidak berlaku bagi masyarakat asli suku Bajo, mereka tetap menerapkan *Bapongka* dalam kehidupan sehari-hari baik pada saat melaut maupun pada saat tidak melaut. Sesuai dengan hasil pengamatan Utina (2014) di lokasi penelitian, bahwa dengan adanya para pendatang telah menyebabkan perubahan dalam hal mata pencaharian. Sebelum adanya para pendatang mata pencaharian suku Bajo umumnya adalah sebagai nelayan, tetapi dengan adanya para pendatang telah memunculkan satuan-satuan usaha, seperti adanya kios-kios dan warung-warung yang menyediakan jasa jual beli pada masyarakat yang membutuhkan bahan pangan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, dengan adanya para pendatang telah memunculkan satuan-satuan pelayanan jasa transportasi seperti ojek motor dan becak. Dengan munculnya satuan-satuan pelayanan sebagai akibat dari adanya para pendatang yang membutuhkan pelayanan terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari telah memicu pula keinginan masyarakat lokal untuk membuka usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan, karena usaha mereka sebagai nelayan tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan demikian penerapan *Bapongka* sudah jarang dilaksanakan oleh masyarakat lokal yang telah membaaur dengan masyarakat pendatang, karena mereka telah disibukkan oleh usaha dagang dan usaha lainnya yang tidak berhubungan dengan kegiatan melaut.

Kenyataan yang dikemukakan di atas tidak berlaku bagi masyarakat asli suku Bajo. Bagi mereka, *Bapongka* harus tetap dipertahankan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak saja berlaku bagi orang tua, tetapi juga bagi generasi sekarang. *Bapongka* sebetulnya bukan membatasi kehidupan suku Bajo, namun justru memandu kehidupan mereka agar tetap lestari. Dengan terjaganya kelestarian alam tempat mereka mencari

penghidupan tentu akan berdampak baik bagi kehidupan mereka. Sesungguhnya dalam *Bapongka* telah tersirat upaya pelestarian ekosistem laut dan pesisir yang tidak disadari oleh masyarakat nelayan suku Bajo.

5. Pembahasan

Suku Bajo beradaptasi dengan perubahan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memanfaatkan sumber daya alam, suku Bajo masih menerapkan cara-cara tradisional yang ramah lingkungan dan terbukti mampu memenuhi kebutuhan subsistennya. Mereka masih menghargai berbagai arahan dari nenek moyangnya. Namun, Suku bajo tidak anti terhadap hal-hal baru. Mereka beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan terkait pemanfaatan sumberdaya lain di luar cara-cara tradisionalnya. Beberapa komunitas suku Bajo tidak tergantung penuh pada mencari ikan saja. Mereka kini sudah ada yang memiliki mata pencaharian di darat, atau memiliki lokasi yang tetap di laut untuk memperoleh sumberdaya. Pergeseran tersebut disebabkan terutama oleh interaksi dengan berbagai etnis yang ditemuinya. Hal positifnya, misalnya suku Bajo kini tidak hanya melakukan penangkapan tetapi mulai melakukan budidaya, tentunya ini berdampak positif pula bagi lingkungan dan keberlanjutan hidup dari suku Bajo sendiri. Melalui budidaya, diharapkan mereka dapat meningkatkan perekonomiannya sehingga meningkatkan taraf hidup terutama kesehatan dan pendidikannya. Hal negatifnya adalah seiring berjalannya waktu, *Bapongka* yang dimiliki suku Bajo ini mengalami erosi, dimana saat ini sudah jarang dilakukan, meskipun masih tetap dilaksanakan dengan sedikit pergeseran cara akibat perkembangan jaman yaitu perubahan kondisi sosial masyarakat dan kemajuan teknologi.

Suku Bajo memiliki kearifan lokal untuk memelihara lingkungan pesisir dan laut dalam memanfaatkan sumberdaya

alam. Karena Suku Bajo adalah orang yang hidup di laut, mereka harus menjaga dan merawat laut sebagai sumber mata pencaharian, dan secara umum sebagai lingkungan hidup. Kearifan lokal Suku Bajo diantaranya adalah konsep *Bapongka* dengan aturan dan pamali yaitu larangan membuang limbah tertentu ke laut dan larangan menangkap ikan yang masih belum memiliki ukuran dewasa. Terkait kearifan lokal, dapat diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Pengertian tentang kearifan lokal tersebut sesuai dengan konsep aturan hidup suku Bajo dengan *Bapongka* dan pamali-nya. *Bapongka* merupakan kegiatan mereka untuk memenuhi kebutuhan subsistennya, sementara pamali menjadi rambu-rambu pelaksanaannya. Meskipun kini kegiatan *Bapongka* sudah tidak sesulit dahulu karena kini suku Bajo pun telah menerapkan teknologi seperti motor tempel ketika melaut.

Kaitan antara *Bapongka* dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat suku Bajo terbukti telah membuat mereka mampu bertahan. Sebagai suku laut nomaden (*sea nomads*), suku Bajo merupakan etnis yang sukses menyebar di lautan nusantara. Konsep kearifan lokal mereka yang berupa larangan sebetulnya bukan membatasi kehidupan mereka, namun justru memandu kehidupan mereka agar tetap lestari. Kelestarian alam tempat mereka mencari penghidupan tentu akan berdampak baik bagi kehidupan mereka. Konsep *Bapongka* dengan aturan dan pamali sangat berperan dalam mencegah kerusakan lautan oleh kegiatan suku Bajo. Moyang suku Bajo telah memikirkan hal-hal tersebut, meskipun tentu saja masih dengan sangat sederhana. Suku Bajo harus menjaga kondisi dan keberlanjutan dari lautnya. Jika laut senantiasa berada dalam kondisi yang baik, tentu hal tersebut akan

menjamin kehidupan mereka. Sebaliknya, jika kondisi lautan rusak, sumber penghidupannya pun berada dalam bahaya. Tanpa disadari, dengan mentaati aturan atau pamali *Bapongka*, kelestarian ekosistem laut dan pesisir akan terjaga. Dengan demikian secara tidak langsung suku Bajo sudah melakukan upaya pelestarian ekosistem laut dan pesisir. Lebih dari itu, konsep aturan pamali bagi suku Bajo sudah bukan hanya soal urusan duniawi. Hal tersebut merupakan bagian dari kosmologi mereka. Konsep tersebut merupakan jalan hidup, nilai-nilai, dan keyakinan spiritual. Implikasi dari nilai-nilai konservasi lingkungan ternyata selama ini telah bersemayam di dalam konsekuensi logis dari kosep *Bapongka* dengan aturan dan pamali suku Bajo. Sedangkan konsekuensi non-logisnya tentu harus kita hargai sebagai nilai spiritual dari suku Bajo. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk memberikan pemahaman bahwa konsep pamali memiliki nilai-nilai pendidikan bagi pelestarian ekosistem laut dan pesisir, yang pada gilirannya akan mempengaruhi hasil tangkapan. Tanpa disadari dengan mentaati *Bapongka* dengan aturan atau pamali, kelestarian ekosistem laut dan pesisir akan terjaga. Dengan demikian secara tidak langsung suku Bajo sudah melakukan upaya pelestarian sumber daya alam laut dan pesisir.

6. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. *Bapongka* memiliki nilai-nilai filosofis, pendidikan, sosial, dan pelestarian lingkungan.
2. Konsep kearifan lokal suku Bajo berupa *Bapongka* dengan aturan dan larangan / pantangan bukan hanya merupakan mekanisme kearifan lokal untuk menjaga lingkungan, namun merupakan jalan hidup, kosmologi, dan kepercayaan spritual Suku Bajo.
3. Konsep kearifan lokal suku Bajo berupa *Bapongka* dengan aturan dan

larangan / pantangan secara tidak langsung merupakan upaya suku Bajo dalam menjaga kelestarian sumber daya dan mencegah kerusakan ekosistem laut dan pesisir.

7. Saran

Penulis ingin menyampaikan beberapa saran berikut:

1. Menghindari punahnya nilai-nilai *Bapongka* sebagai wujud pelestarian ekosistem laut dan pesisir, maka perlu diupayakan peningkatan kesadaran setiap warga suku Bajo terhadap fungsi dan peranan *Bapongka* dalam kehidupan sehari-hari.
2. *Bapongka* yang berlaku di kawasan pesisir dapat digunakan dan direvitalisasi lagi agar nilai-nilai positifnya dapat dimanfaatkan untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir itu sendiri, dengan mengupayakan untuk memberikan pemahaman bahwa *Bapongka* memiliki nilai-nilai pendidikan bagi pelestarian ekosistem laut dan pesisir; mengenalkan dan menerapkannya bagi penyelamatan ekosistem laut dan pesisir terutama pada kalangan generasi muda.
3. Diharapkan kepada tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, pemimpin formal di desa untuk memberikan panutan dengan tetap melakukan *Bapongka* dalam kehidupannya sehari-hari baik pada saat melaut maupun tidak melaut.

Daftar Pustaka

- Anonimus. 2013. Situs <http://www.orang-gu.com/2013/03/orang-bajau-laut-dan-perubahan-iklim.html>. Diakses 12 Januari 2016.
- Arafah, N. 2002. *alam Sistem Pertanian di Sula Pengetahuan Lokal Suku Moronene Dwesi Tenggara*. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Aulia T, Dharmawan AH. 2010. "Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air di Kampung Kuta." 2(2):345-355. Situs <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=83579&val=223&title>. Diakses 12 Januari 2016.
- Bahtiar. 2012. "Kearifan Lokal Orang Bajo dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut." *Jurnal Sosial Budaya MUDRA Volume 27*, Nomor 2, Juli 2012. p 178-185. Situs http://repo.isidps.ac.id/1654/1/007_Bahtiar.pdf. Diakses 12 Januari 2016
- Baskara B dan Astuti O. 2011. "The Pamali of Wakatobi Bajo and its Role for Marine Conservation." *Journal of Indonesia Coral Reefs*, 1(2), Situs <http://coastalunhas.com/incres/data/68863483a175a6bf9c7411bd5f2c0439.pdf>. Diakses 12 Januari 2016.
- Basuni S. 2012. "Mengelola Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Berbasis Pengetahuan Tradisional dan Kearifan Lokal." *Makalah Seminar Hasil-hasil penelitian Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumberdaya Alam*. Diakses 12 Januari 2016.
- Hamzah A. 2008. "Respons Komunitas Nelayan terhadap Modernisasi Perikanan (Studi Kasus Nelayan Suku Bajo di Desa Lagasa Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)." *Tesis master* yang tidak dipublikasikan. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Hasman FR. 2009. "Kekerabatan Masyarakat Bajou. Medan: Fak. Sastra Universitas Sumatera Utara." Situs <http://repository.usu.ac.id>. Diakses 12 Januari 2016.
- Keraf, Gorys. 2002. *Etika Lingkungan*. Kompas: Jakarta.
- Lampe. 2011. "Dinamika Kelembagaan Sosial Ekonomi Orang Bajo." *Jagad Bahari Nusantara*. Situs <http://centerformunawareducation.files.wor>

- dpress.com. Diakses 12 Januari 2016.
- Makmur A. (Ed). 2011. *Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan.
- Mamar S. 2005. *Kebudayaan Masyarakat Maritim*, Palu: Tadulako University Press.
- Mitchell, *et al.* 2000. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Nababan. 2003. "Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat Adat, Tantangan dan Peluang." Situs http://dte.gn.org.../makalah_ttg_psda_berb-ma_di_pplhipb.htm. Diakses 12 Januari 2016.
- Ramli, Utina. 2014. Bapongka : Studi Nilai Pendidikan Pelestarian Ekosistem Laut dan Pesisir Pada Masyarakat Bajo. Situs <http://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/1/406.html>. Diakses 12 Januari 2016.
- Sangadji M.N. 2009. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA di Kepulauan Togean. *J. Agroland* 19 (2):149-158, Agustus 2012.
- Sangadji M.N dkk. 2011. "Strategi Penyuluhan di Kawasan Konservasi (Kasus Taman Nasional Kepulauan Togean)." *Jurnal Penyuluhan*. September 2011. Vol.7. No.2.
- Suyuti N. 1996. "Kehidupan Sosial Budaya Komunitas Nelayan di Boenaga, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara." (Hasil penelitian. Kerjasama FISIP Unhalu Depsos Sulawesi Tenggara di Desa Sulaho Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.
- Suyuti N. 2011. "Interaksi Orang Bajo dan Orang Bugis: dalam Konteks Kearifan Lokal-Global di Desa Sulaho, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Jagad Bahari Nusantara." Situs <http://centerformunawareducation.files.wordpress.com>. Diakses 12 Januari 2016.
- Utina, Ramli. 2012. "Kecerdasan Ekologis Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Bajo, Desa Torosiaje, Provinsi Gorontalo." Situs <http://repository.ung.ac.id/.../kecerdasan-ekologis-dalam-kearifan-lokal-masyarakat-bajo-desa-torosiaje-provinsi-gorontalo>. Diakses 12 Januari 2016.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. 2001. *I Sesat Kelola Wilayah Pesisir Laut*, Palu: Walhi Sulteng.